

## Atasi Kemacetan, DPUPR Kota Tangerang akan Bangun 2 U-Turn

TANGERANG (IM)- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tangerang telah mencanangkan akan membangun dua U-Turn di Jalan Maulana Hasanudin.

Hal tersebut untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di wilayah tersebut khususnya jalur perlintasan dekat Stasiun Poris, Kecamatan Batu-ceper, Kota Tangerang.

Di perlintasan Stasiun Poris kerap menjadi titik kemacetan. Pasalnya, banyak pengendara yang melintas dari arah Jakarta atau sebaliknya. Kemacetan kerap terjadi di jam-jam padat berangkat dan pulang kerja.

Kepala DPUPR Kota Tangerang, Ruta Ireng Wicaksono menyatakan, pada 2024 ini pihaknya sudah merencanakan untuk menata geometrik sepanjang Jalan Maulana Hasanudin dengan membangun U-Turn di dua lokasi.

“Tepatnya, U-Turn yang akan dibangun di area Superindo dan area SPBU Pertamina di Tahun Anggaran 2024 ini. Sedangkan sebelumnya, di tahun

2022 juga sudah dibangun dua U-Turn di area Perumahan Cipondoh Makmur dan area Komplek Garuda,” katanya, Rabu (15/5).

Pada tahun 2022, DPUPR Kota Tangerang juga sudah melakukan pelebaran perlintasan sebidang dekat Stasiun Poris. Sehingga, kapasitas persimpangan sudah menjadi dua arah dan masing-masing dua jalur.

“Atas pelebaran jalan tersebut dinilai sudah cukup efektif mengurangi kemacetan. Namun, saat ini masih kerap terjadi dan membutuhkan penanganan lebih lanjut dengan akan ditambahnya dua U-turn di tahun ini,” ungkapnya.

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang untuk lebih intens melakukan pemantauan.

“Serta menurunkan petugas untuk melakukan pengurangan kemacetan di jam-jam padat,” pungkasnya. **pp**

## Pemkab Bogor Raih Opini Kualitas Tertinggi Penyelenggaraan Pelayanan Publik



Pemkab Bogor raih opini kualitas tertinggi penyelenggaraan pelayanan publik dari Ombudsman RI.

CIBINONG (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor meraih opini kualitas tertinggi pada penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 dari Ombudsman Republik Indonesia (RI). Pemkab Bogor memperoleh nilai 96,15 poin yakni kategori A atau zona hijau dengan opini kualitas tertinggi.

Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menerima hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tersebut secara langsung dari Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Dedy Irsan, di Ruang Rapat Bupati Bogor, Cibinong, Selasa (14/5). Hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tersebut dilakukan di beberapa unit pelayanan di lingkungan Pemkab Bogor.

Untuk diketahui, unit lokus penilaian penyelenggaraan pelayanan publik di antaranya UPT Puskesmas Citeureup dengan nilai 98,99 kategori A (zona hijau) opini kualitas tertinggi. UPT Puskesmas Cimandala dengan nilai 97,47 kategori A (zona hijau) opini kualitas tertinggi.

Dinas Sosial dengan nilai 97,35 kategori A (zona hijau) opini kualitas tertinggi. Dinas Kesehatan dengan nilai 96,76 kategori A (zona hijau) opini kualitas tertinggi.

kualitas pelayanan publik dengan pelayanan yang berkeadilan tanpa diskriminasi bagi masyarakat di Kabupaten Bogor.

“Hasil penilaian ini menjadi penyemangat kami semua agar terus meningkatkan pelayanan yang terbaik, dan juga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi saat ini,” tuturnya.

Asmawa menjelaskan, Pemkab Bogor terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari segi kebijakan, meningkatkan profesionalisme SDM aparatur, meningkatkan sarana prasarana pada unit layanan, membuka layanan konsultasi dan pengaduan berbasis teknologi informasi.

“Berbagai inovasi dilakukan terkait pelayanan publik dengan membangun sistem aplikasi untuk kemudahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Kemudian pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang insya Allah akan diresmikan dalam waktu dekat,” jelas Asmawa.

Ia menambahkan, pada bulan April 2024, Pemkab Bogor berhasil meraih penghargaan yakni juara pertama pada penganugerahan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Awards 2024 kategori Kabupaten dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Tahun 2023, meraih penghargaan kearsipan karena mendapatkan nilai hasil pengawasan kearsipan kategori “A” atau memuaskan dan memperoleh kinerja terbaik di Provinsi Jawa Barat. Dan penghargaan lainnya terkait reformasi birokrasi.

“Di akhir tahun 2023 kami berhasil memperoleh predikat kabupaten sangat inovatif, dalam Innovative Government Award (IGA) dari Kementerian Dalam Negeri,” ujar Asmawa Tosepu.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jakarta Raya, Dedy Irsan memberikan apresiasi kepada Pemkab Bogor atas capaian penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023. Karena terjadi kenaikan yang signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023.

“Ini prestasi yang luar biasa, saya minta terus dipertahankan bahkan terus ditingkatkan lagi. Harapannya tahun 2024 bisa menjadi yang terbaik di Jawa Barat bahkan di tingkat nasional,” kata Dedy.

Ia juga menerangkan, Kabupaten Bogor adalah kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar se-Indonesia dan wilayah yang luas, mengelolanya bukan hal yang mudah. Berbagai inovasi terus dilakukan, menunjukkan komitmen Pemkab Bogor memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. **gio**

# 8 Nusantara



## PAMERAN INDUSTRI PERMINYAKAN 2024

Pengunjung melihat fosil milik Kementerian ESDM yang dipamerkan di IPA Convex 2024 di ICE BSD, Kab. Tangerang, Banten, Rabu (15/5). Pameran terkait Industri Perminyakan ini diselenggarakan oleh Indonesian Petroleum Association (IPA) yang diikuti ratusan perusahaan terkait perminyakan ini diharapkan menjadi momentum ketahanan energi berkelanjutan.

LAHIR DARI ASPIRASI SEJUMLAH WARGA

## Pj Bupati Muaro Jambi Siapkan Mobil Rakyat Gratis

Mobil Rakyat Gratis 24 jam siap melayani warga untuk kondisi khusus seperti minta diantar ke rumah sakit, tengah malam mau melahirkan dan sejenisnya. Ini merupakan bagian dari tanggungjawab seorang pemimpin yang harus peka merespon aneka aspirasi rakyat, kata Pj. Bupati Muaro Jambi, Bahcyuni Deliansyah.

MUARA JAMBI (IM)- Warga Muaro Jambi tak lagi kesulitan untuk mendapatkan kendaraan yang dibutuhkan pada saat darurat. Sebuah kendaraan bernama MOBIL RAKYAT Gratis 24 jam siap melayani warga untuk kondisi khusus seperti minta diantar

ke rumah sakit, tengah malam mau melahirkan dan sejenisnya. Kendaraan tersebut, secara resmi disosialisasikan Pj. Bupati Muaro Jambi, Bahcyuni Deliansyah, di halaman Aula Rumah Dinas Bupati dalam rangkaian Musrembang RPJPD Kabupaten Muaro Jambi, Rabu (15/5).

“Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, mulai hari ini, Rabu 15 Mei 2024, secara resmi saya launching sebuah kendaraan bernama MOBIL RAKYAT untuk digunakan warga Muaro Jambi kapan saja selama 24 jam dalam keadaan yang darurat,” kata Bahcyuni, dalam siaran persnya.

Menurut Deliansyah mobil tersebut lahir dari aspirasi sejumlah warga yang diterimanya saat dirinya berkeliling dari kampung ke kampung, khususnya saat sebulan penuh bersafar ramadhan. Hasil dari berbagai kunjungan menemui warga itulah, muncul sebuah ide untuk segera disiapkan, minimal sebuah kendaraan, dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan warga saat keadaan darurat. Contohnya, ada ibu-ibu yang tengah malam mau melahir-

kan dan minta diantar ke rumah sakit atau badan.

“Sebagai Pj Bupati, saya tentu tak boleh menutup mata terhadap kebutuhan warga ini. Sehingga, dengan cepat saya minta SKPD terkait untuk segera mengadakan mobil gratis 24 jam tersebut. Ini tentu bagian dari tanggungjawab seorang pemimpin yang harus peka merespon aneka aspirasi rakyat,” kata Deliansyah.

Ia mengakui, dibanding dengan jumlah penduduk dan luas geografis Muaro Jambi, satu mobil itu pasti tak cukup. Sehingga, pada saatnya nanti, harus dipertimbangkan, untuk minimal, satu kecamatan satu mobil. Tentu lebih bagus jika setiap desa satu mobil.

Deliansyah menjelaskan, untuk memudahkan warga mengakses dan menggunakan

Mobil Rakyat tersebut, pihaknya sudah menyiapkan puluhan relawan untuk melakukan door to door dari rumah ke rumah. Hal ini penting agar rakyat dengan mudah, kemana mereka harus menghubungi pada saat mobil tersebut diperlukan.

“Insya Allah, para relawan kita akan mendatangi rumah-rumah warga dengan membawa stiker yang bertuliskan nomor handphone yang bisa dihubungi. Sehingga, kapan saja mereka perlu, dengan mudah bisa mengontak nomor tersebut yang siap 24 jam,” tandasnya.

Adapun nomor yang bisa dihubungi tersebut adalah, (082279108484 dan (082279108585. Deliansyah mempersilakan, jika ada warga benar-benar membutuhkan mobil tersebut untuk segera menghubunginya. **pra**

## Rembuk Stunting Pemkab Bogor Menuju Zero Stunting

CIBINONG (IM)- Untuk mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Bogor menuju zero stunting, Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Bogor sekaligus menyalurkan bantuan ke Posyandu Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang, Selasa (14/5).

Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu mengatakan, penurunan angka stunting adalah pekerjaan besar pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah termasuk Kabupaten Bogor. Salah satunya dengan rembuk stunting melalui 8 agenda penurunan prevalensi stunting.

“Hari ini Pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan salah satu agenda dari 8 agenda penurunan prevalensi stunting secara nasional yaitu rembuk stunting. Rembuk ini dihadiri oleh seluruh stakeholder dalam rangka penurunan angka stunting,” tuturnya.

Perlu diketahui bahwa secara nasional target penurunan angka stunting tahun 2024 sebesar 14 persen. Target Provinsi Jawa Barat sebesar 17,2 persen dan Kabupaten Bogor targetnya 12,3 persen.

“Kami terus bergerak untuk menurunkan angka stunting, kami yakin dan percaya dengan kegiatan semacam ini akan menumbuhkan kesadaran bersama seluruh stakeholder untuk sama-sama menurunkan stunting dengan optimal,” terang Pj. Bupati Bogor.

Lanjut Asmawa Tosepu menjelaskan, beberapa cara menurunkan stunting yakni, dari sisi kesehatan, pola makan, pola istirahat termasuk sanitasi dan lainnya, artinya semua aspek harus bergerak mulai dari infrastruktur, penyelidikan air bersih, lingkungan, rumah layak huni.

Kemudian yang paling penting adalah sosial budaya bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat dari masyarakat itu sendiri serta pemenuhan gizi melalui asupan protein dan makanan yang bergizi.

“Protein di Kabupaten Bogor ini sangat tersedia banyak dan mudah didapatkan seperti ikan-nya juga mudah didapatkan apalagi daging juga mudah didapat. Sumber-sumber protein yang berkontribusi terhadap percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Bogor gampang diperoleh,” jelasnya.

Asmawa Tosepu menyampaikan, telah memerintahkan Perangkat Daerah (PD) terkait. Mulai dari Pj. Sekda, Bappeda, DKKP dan lainnya untuk segera menyusun regulasi kebijakan terkait dengan adanya orang tua angkat stunting.

Katanya, semua bisa menjadi orang tua angkat terhadap mereka yang dari hasil pengukuran badan terindikasi stunting juga terhadap ibu hamil yang perlu perhatian khusus. Dengan menerapkan kebijakan orang tua angkat atau orang tua asuh maka insya Allah ini bisa memberi berpengaruh.

“Anggap saja kita bersedekah, setiap bulan kita berikan dukungan kepada keluarga tersebut,” tandasnya.

Kemudian, Kabid PPM Bappedalibang Kabupaten Bogor, Tika Mustika Effendi mengatakan, maksud dan tujuan dari pelaksanaan rembuk stunting ini adalah untuk memastikan pelaksanaan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara terintegrasi dengan baik antara perangkat daerah penanggung jawab layanan dengan sektor atau lembaga non pemerintah dan masyarakat. **gio**



Pj Bupati Bogor terus mencari solusi turunkan stunting hingga zero stunting.

## Pemkot Bandung Optimistis Capai Target Penurunan Stunting 2024

BANDUNG (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggenjot upaya penurunan prevalensi stunting pada 2024. Upaya tersebut untuk mengejar angka 14 persen sesuai target prevalensi nasional.

Sejumlah upaya yang masih bergulir, antara lain menambah lokus percepatan penurunan prevalensi stunting pada 2024 sebanyak 120 kelurahan. Jumlah ini meningkat 32 kelurahan, dari sebelumnya 88 kelurahan pada 2023.

Adapun pada 2022, lokus percepatan penurunan prevalensi stunting Kota Bandung sebanyak 30 kelurahan, dan sebanyak 15 kelurahan pada 2020-2021.

Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono optimistis, upaya percepatan penurunan prevalensi stunting berjalan maksimal dengan upaya-upaya yang akan dan sedang dilakukan.

Di sisi lain, ia menekankan akurasi data sebagai bagian yang penting agar Pemkot Bandung dapat melakukan intervensi yang proporsional untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting.

“Data ini harus lebih baik. Sehingga saat evaluasi periodik, kita tidak salah dalam melakukan intervensi,” kata Bambang

Tirtoyuliono dalam kegiatan penyampaian hasil analisis situasi dan lokus intervensi stunting 2025, Rabu (15/5).

Sebagai informasi, pada 2023, kolaborasi antar lini Pemkot bersama masyarakat Kota Bandung berhasil menekan angka stunting dari 19,4 persen (2022) menjadi 16,3 persen.

Berkaca pada capaian penurunan sebesar 3,1 persen dari periode 2022 ke 2023, pihaknya optimistis target prevalensi stunting pada 2024 sebesar 14 persen dapat dicapai. Hal itu bisa tercapai dengan kolaborasi antar lini, baik di Pemerintahan maupun masyarakat.

“Ada jarak lebih kurang 2,4 persen (dari capaian 2023 ke target 2024). Ini tantangan bagi kita. Tetapi saya yakin betul, semua aparat di kewilayahan sama-sama bekerja untuk menekan angka stunting,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan, keberhasilan menurunkan angka stunting bakal menjadikan Kota Bandung punya SDM unggul di era Indonesia Emas 2045 mendatang.

“Mari kita evaluasi secara komprehensif, juga update data dengan benar. Dari situ, kita bisa melakukan intervensi dengan benar. Kita hadirkan anak-anak Kota Bandung yang luar biasa di era Indonesia Emas 2024,” ujar dia. **pra**